

PENGEMBANGAN PERBENIHAN SAPI POTONG DAN PERANNYA DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI

Improving Beef Cow-Calf Production and Its Role in Beef Self-Sufficiency Achievement

Bambang Sayaka

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161
E-mail : bambangsayaka@yahoo.com*

Naskah masuk : 30 Maret 2012

Naskah diterima : 4 Juni 2012

ABSTRACT

The Beef Self-Sufficiency Program (PSDS) to be realized in 2014 is one of the main agricultural development targets for the period of 2010-2014. Some regulations are launched to support this program. Many provincial governments create program to encourage domestic cattle population. Artificial insemination (AI) is still a dominant method besides natural reproduction through the village breeding centers (VBC). Supply of quality frozen semen at sufficient quantity and affordable price, expanding number of inseminators, improving VBC, profitable domestic cows' price, feed supply, and grazing land intensification are prerequisites for beef self-sufficiency achievement.

Key words: *beef, self-sufficiency, artificial insemination, breeding*

ABSTRAK

Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2014 merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan pertanian periode 2010-2014. Berbagai peraturan telah diluncurkan untuk mendukung PSDS. Demikian juga berbagai program di daerah dibuat untuk meningkatkan populasi sapi potong demi keberhasilan PSDS. Peningkatan populasi sapi melalui upaya perbenihan, khususnya inseminasi buatan (IB), masih merupakan pilihan utama disamping pembibitan rakyat dengan cara alami (VBC). Permintaan IB yang tinggi perlu diimbangi dengan penyediaan semen beku dalam jumlah dan mutu yang memadai serta harga yang terjangkau. Disamping itu perlu penambahan jumlah inseminator, perbaikan VBC, peningkatan harga jual sapi dalam negeri, kecukupan pakan, serta intensifikasi lahan penggembalaan merupakan prasyarat keberhasilan PSDS.

Kata kunci: *daging sapi, swasembada, inseminasi buatan, perbenihan*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi merupakan bagian dari empat sasaran Kementerian Pertanian seperti diuraikan dalam Rencana Strategis periode 2010-2014. Keempat sasaran utama tersebut adalah: (i) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (ii) peningkatan diversifikasi pangan, (iii) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, dan (iv) peningkatan kesejahteraan petani (Kementerian

an Pertanian, 2014). Untuk mencapai swasembada daging sapi maka produksi daging sapi dalam negeri tahun 2014 minimal sebesar 0,55 juta ton. Berdasarkan populasi sapi yang ada maka pertumbuhan jumlah sapi rata-rata minimal 7,30 per tahun agar tercapai swasembada daging sapi. Untuk mencapai swasembada daging sapi Kementerian Pertanian meluncurkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 (Peraturan Menteri Pertanian 19/2010). PSDS menggantikan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) tahun 2010 yang dicanangkan

oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2008 (Departemen Pertanian, 2008).

Pembibitan sapi potong juga merupakan salah satu komponen utama dalam PSDS 2014. Dalam program ini optimalisasi akseptor dan kelahiran inseminasi buatan (IB) maupun kawin alami (KA) terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Perbaikan mutu dan penyediaan bibit sapi potong dilakukan oleh pembibitan pemerintah atau Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU), pembibitan swasta, dan pembibitan ternak rakyat atau *Village Breeding Centers* (VBC). Walaupun demikian, masih bisa dipertanyakan apakah perbaikan penyediaan bibit sapi potong tersebut mampu mencapai sasaran dalam kurun waktu dua tahun kedepan atau hingga tahun 2014.

Sementara itu, mengingat kebutuhan bibit sapi potong masih sangat tinggi karena permintaan daging sapi domestik yang belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka peningkatan sistem pembibitan sapi lokal dinilai sangat strategis. Impor daging sapi dan impor sapi bakalan selama ini masih ditempuh untuk memenuhi permintaan daging yang terus meningkat. Impor daging sapi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) produksi daging sapi meningkat tetapi lebih rendah dari laju permintaan, (ii) produksi daging relatif tetap atau menurun tetapi permintaan daging meningkat, dan (iii) produksi daging menurun tajam walaupun permintaan tetap (Diyanto dan Saptati, 2010).

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem perbenihan subsektor peternakan (bibit sapi potong) dalam mendukung PSDS.

KEBIJAKAN PERBENIHAN SAPI POTONG

Berbagai kebijakan pemerintah telah ditetapkan melalui peraturan perbenihan sapi potong. Semua kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produksi sapi potong yang diarahkan untuk tercapainya swasembada daging sapi. Berikut berbagai kebijakan terkait perbenihan sapi potong.

Sistem Perbibitan Ternak Nasional diatur dalam Permentan No. 36 Tahun 2006

(Departemen Pertanian, 2006) dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak agar bisa untuk mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan. Permentan ini juga bertujuan memberikan jaminan kepada peternak guna mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam Permentan No. 36 Tahun 2006 tersebut ditegaskan bahwa pengembangan bibit ternak dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, badan hukum, kelompok peternak dan atau perorangan. Perorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing yang melakukan pengembangan bibit dasar yang berasal dari sumber daya genetik ternak asli atau lokal untuk tujuan komersial harus memperoleh ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practice*) diatur dalam Permentan No. 54/2006 yang merupakan acuan bagi pembibit sapi potong dalam menghasilkan bibit sapi potong bermutu baik dan bagi dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dalam pengembangan usaha pembibitan sapi potong yang baik. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini yaitu agar dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan sapi potong dapat diperoleh bibit sapi potong yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan kesehatan hewan.

Lokasi usaha pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), (ii) Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) setempat; (iii) mempunyai potensi sebagai sumber bibit sapi potong, (iv) ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit ternak; (v) terkonsentrasi dalam satu kawasan atau satu Village Breeding Center (VBC) atau satu unit pembibitan ternak; (vi) tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; (vii) memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; (viii) jarak antara usaha pembibitan sapi potong dengan usaha pembibitan

unggass minimal 1.000 meter (Departemen Pertanian, 2006).

Petunjuk Teknis (Juknis) Pembibitan Ternak Unggul dituangkan dalam Peraturan Dirjen Peternakan No. 122/11.06 (Direktorat Jenderal Peternakan, 2006) yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2006. Juknis ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional. Juknis ini sebagai acuan bagi unit pelaksana teknis pembibitan ternak unggul dalam melaksanakan produksi dan distribusi bibit ternak, serta bagi instansi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha lainnya yang memerlukannya.

Tujuan juknis ini adalah untuk: (i) menghasilkan bibit ternak yang memenuhi persyaratan mutu bibit; (ii) melaksanakan distribusi bibit ternak secara tepat dan terarah; (iii) memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lainnya dalam memperoleh bibit ternak yang memenuhi persyaratan mutu. Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi: (i) produksi bibit ternak; (ii) distribusi bibit ternak; (iii) promosi; dan (iv) pengawasan dan pelaporan.

Pengawasan ternak meliputi bibit sapi potong (bibit betina dan bibit jantan) lokal dan impor. Klasifikasi bibit sapi potong meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar. Untuk dapat ditunjuk sebagai pengawas mutu bibit ternak, harus memenuhi persyaratan: (i) Menduduki jabatan fungsional pengawas bibit ternak di Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota; (ii) Dalam hal pejabat fungsional pengawas bibit ternak belum ada di provinsi atau kabupaten/kota, maka Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menunjuk petugas pengawas mutu; (iii) Mengikuti pelatihan tenaga pengawas mutu bibit sapi potong yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berkompeten minimal selama 50 jam, dinyatakan lulus dan bersertifikat.

Direktur Jenderal Peternakan pada tahun 2006 menetapkan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Dirjen Peternakan No. 121/11.06 ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional. Juknis ini digunakan untuk pengawasan semen beku sapi dan

kerbau adalah sebagai acuan bagi aparat dalam melakukan pengawasan mutu di lapangan, agar mutu semen yang diproduksi dan diedarkan/diperdagangkan sampai kepada peternak tetap terjamin sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ruang lingkup pengawasan mutu semen beku meliputi lokasi dan obyek, tatacara pemeriksaan mutu semen, tatacara pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan mutu terhadap semen beku dilakukan di tingkat produsen adalah di BIB Nasional dan Daerah, di bandara atau pelabuhan laut khusus untuk semen beku impor, dan di lapangan yaitu di Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan Pos IB, insinator dan swasta/koperasi. Obyek pengawasan dan penanganan terhadap semen beku meliputi semen beku dan penanganan semen beku (Direktorat Jenderal Peternakan, 2006).

Standar Nasional Indonesia SNI 01-4869.1-2005 untuk Semen Beku Sapi

Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-4869.1-2005) tentang semen beku sapi yang merupakan revisi dari SNI 01-4869.1-1998. Standar ini dirumuskan sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance*). Standar ini meliputi istilah dan definisi, spesifikasi, persyaratan mutu, pengemasan, pengambilan contoh semen beku di tingkat produsen dan konsumen, pemeriksaan contoh untuk semen beku sapi. Yang dimaksud dengan semen beku sapi adalah yang berasal dari pejantan sapi terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan di dalam rendaman nitrogen cair pada suhu minus196°C pada container (Badan Standardisasi Nasional, 2005).

PSDS semula secara efektif dimulai pada tahun 2008, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 59/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) (Departemen Pertanian, 2007) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 (Departemen Pertanian, 2007). Kemudian

kedua Permentan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 (Kementerian Pertanian, 2010). Pedoman ini digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksana kebijakan dan kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan PSDS 2014, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan beberapa kementerian teknis lainnya.

Sasaran PSDS adalah: (i) meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,48 persen; (ii) meningkatnya produksi daging dalam negeri sebesar 420,3 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat 10,4 persen setiap tahunnya; (iii) tercapainya penurunan impor sapi dan daging sehingga hanya mencapai 10 persen dari kebutuhan konsumsi masyarakat; (iv) bertambahnya penyerapan tenaga kerja sebagai dampak dari penambahan populasi dan produksi ternak sebesar 76 ribu orang/tahun; dan (v) meningkatnya pendapatan peternak sapi potong minimal setara dengan UMR masing-masing provinsi.

Pencapaian PSDS ditempuh melalui tiga skenario, yaitu *pesimistic*, *most likely*, dan *optimistic*. Dengan skenario *pesimistic*, *most likely*, dan *optimistic* maka pada tahun 2014 diperkirakan produksi domestik diperkirakan masing-masing 47,6 persen, 90 persen, dan 110 persen. Sedangkan impor sapi untuk ketiga skenario tersebut pada tahun 2014 diperkirakan masing-masing 52,4 persen, 10 persen, dan -10 persen. Artinya dengan skenario *optimistic* maka produksi dalam negeri akan mencapai 110 persen dari kebutuhan daging domestik.

Swasembada daging semula dicanangkan pada tahun 2008 dan ditargetkan akan dicapai pada tahun 2010, tetapi tahun 2009 diundur menjadi tahun 2014. Rencana swasembada daging ini mundur menurut Menteri Pertanian karena lahan peternakan Indonesia tidak terlalu luas dibanding Australia dan Brazil (Wahyuni, 2009). Walaupun demikian masih dipertanyakan apakah PSDS mampu mencapai sasaran swasembada daging sapi pada tahun 2014.

IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN SAPI POTONG

Pengembangan usaha pembibitan sapi bisa dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah. Pembibitan sapi lokal cenderung menurun di sentra pertanian yang disebabkan oleh penggunaan traktor yang menggantikan sapi dalam membajak serta keberadaan IB yang bersaing dengan pembibitan rakyat. Sementara itu produksi semen beku untuk IB dari UPT Pembibitan belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Di lain pihak, sektor swasta kurang tertarik investasi dalam pembibitan sapi potong tetapi lebih menyukai penggemukan sapi (Hadi dan Ilham, 2002).

Ketersediaan bibit sapi potong, selain melalui perkawinan secara alami, juga mengandalkan semen beku. Kebutuhan semen beku selama ini dipasok sebagian besar oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan BIB Singosari sebanyak 2,3 - 3,4 juta dosis per tahun atau 65 sampai 85 persen kebutuhan nasional. Sedangkan BIB di daerah, yaitu di 14 provinsi, hanya menyumbang sekitar 20 persen semen beku. Kekurangan semen beku pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing 676.130 dan 332.175 dosis. Selain itu, juga ada pembibitan swasta yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan bibit sendiri bukan untuk dijual kepada peternak secara nasional (Kompas, 2008).

Semen beku *sexing* yang diterapkan di BBIB Singosari memberikan hasil yang cukup bagus. Hingga bulan Agustus 2006 telah lahir pedet jantan sebanyak 33 ekor dari kelahiran 47 ekor (70%) menggunakan semen beku *sexing* Y. Sedangkan penggunaan semen beku *sexing* X menghasilkan 29 ekor pedet betina dari 30 kelahiran (96%). Fertilitas semen beku tersebut memiliki S/C 1,71 dan CR 56,45 persen (Diyanto dan Herliantien, 2006). Semen beku *sexing* ini dimulai di BBIB Singosari sejak tahun 2004. Data pada bulan November 2007 tercatat dari *sexing* Y berhasil 68,02 persen (217 ekor lahir jantan dari 319 ekor kelahiran) dan dari *sexing* X berhasil 81,28 persen, yaitu 456 ekor lahir betina dari 561 ekor kelahiran (BBIB, 2009).

Kegiatan pengembangan perbenihan sapi potong telah dilakukan di berbagai daerah

melalui kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), khususnya ditujukan untuk mendukung PSDS tahun 2014. Misalnya, secara fisik tingkat pencapaian target dari Provinsi Jawa Barat dinilai sudah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan akseptor (populasi betina) atau potensi akseptor IB yang mencapai 40 persen dari potensi setiap kecamatan di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Upaya ini tidak terlepas dari peran aktif BIB yang ada, yakni BIB Lembang (di Provinsi Jawa Barat) dan BBIB Singosari (di Provinsi Jawa Timur) yang juga diminta melakukan kegiatan penerapan, bimbingan teknis, serta pelatihan kegiatan IB kepada kelompok-kelompok peternak (sekitar 150 orang) di seluruh Jawa Barat melalui koordinasi kegiatan dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat serta Organisasi IB Jabar (Sayaka *et al.*, 2009).

Sumber utama pemenuhan kebutuhan semen beku bagi kelompok peternak di seluruh kabupaten di Jawa Barat berasal dari BIB Lembang. BIB Lembang pada dasarnya mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku benih unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012). Disamping itu di Jawa Barat juga terdapat Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD) yang merupakan salah satu bagian dari unit kerja pada Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong merupakan UPTD milik Pemerintah Provinsi yang didirikan pada tahun 2002 di Kabupaten Ciamis. Keberadaan dan perannya dalam kebutuhan semen beku di seluruh Jawa Barat juga belum menunjukkan kemampuan memenuhi seluruh permintaan, kecuali untuk beberapa wilayah pengembangan saja, seperti Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Sumedang. Keterbatasan BIBD menghasilkan *straw* tidak terlepas dari kondisi ternak sapi sumber/penghasil *straw* (*bull*) yang tersedia. Umur maupun jenis sapi yang dipelihara dan dimiliki oleh BIBD masih terbatas pada hasil pengadaan pada TA 2002, yaitu Simmental (2 ekor) dan Limusin (2 ekor) yang kemudian berkurang 1 ekor pada tahun 2003. Selain itu, permintaan para peternak pada *straw* dari jenis sapi Limousin dan Simental cenderung

meningkat dan selama ini belum mampu dilayani secara penuh BIBD. Hambatan lain yang dihadapi BIBD adalah ketidak-sesuaian suhu dalam kegiatan laboratorium sehingga proses penyimpanan *straw* menjadi kurang optimal.

Untuk mendukung rencana tersebut, juga telah diusulkan penambahan luas areal lahan untuk pertanaman pakan hijauan ternak, mengingat populasi sapi (dari berbagai jenis) yang ada saat ini relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan luas areal hijauan yang ada. Usulan lain yang juga penting dalam pengembangan institusi ke depan adalah peningkatan dan penguatan fungsi BIBD dalam proses pemenuhan kebutuhan semen beku sesuai dengan visi UPTD BPPT Sapi Potong sebagai penghasil bibit ternak sapi potong berkualitas tahun 2010. Dalam konteks ini, keberadaan institusi ini akan lebih berperan mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya dalam Program Pengembangan Jawa Barat Menuju Populasi Satu Juta Sapi Potong yang sejalan dengan PSDS tahun 2014. Walaupun demikian pencapaian satu juta sapi potong tidak mudah dicapai, antara lain karena berbagai hambatan seperti: (i) peternak kekurangan modal untuk membeli sapi potong, dan (ii) alih fungsi lahan peternakan dan lahan pertanian (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2009).

Salah satu program unggulan daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembibitan sapi potong adalah program "Sapi Berlian", artinya upaya peningkatan populasi ternak sapi dengan program "Beranak Lima Juta dalam Lima Tahun". Program ini baru dirintis dan secara tidak langsung merupakan program pendukung bagi program nasional swasembada daging sapi.

Kegiatan pembibitan sapi potong di Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan dengan pola pengembangan IB. Secara teknis, pola pengembangan sapi potong juga didukung dengan program dasar Intan Sejati (2004-2009) yang kemudian dikembangkan dengan usulan program Sapi Berlian. Dalam pelaksanaannya, kedua program tersebut sejalan dengan beberapa indikator yang dipersyaratkan dalam PSDS sebagai program nasional. Dukungan untuk pengembangan sapi potong juga dilakukan melalui pola pengembangan kawasan dengan telah dibentuknya kawasan

perbibitan sapi potong rakyat di daerah pedesaan (*Village Breeding Centre* atau VBC). Disisi lain, adanya lembaga Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) sebagai produsen semen beku nasional yang berkedudukan di Jawa Timur sangat memungkinkan pemberian bimbingan teknis kepada para inseminator maupun para peternak.

Dari sisi produksi, program tersebut direalisasikan melalui upaya pemenuhan kebutuhan bibit dengan cara IB. Pemenuhan kebutuhan straw sebagai media IB dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan tingkat provinsi dengan BBIB Singosari. Pengaturan kebutuhan dan pemenuhan straw di Jawa Timur dilakukan oleh setiap UPT IB di tiap wilayah serta kompleks peternakan. Target yang diharapkan tercapai hingga tahun 2009 adalah pemenuhan 1,3 juta straw, sebagai upaya mendukung Program Sapi Berlian (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2009).

Target pencapaian sapi Berlian juga dilakukan dengan pengawalan yang cukup intensif dengan melibatkan kegiatan dalam program Sarjana Masuk Desa (SMD) yang khusus membidangi sub sektor peternakan. Diantara kegiatan tersebut adalah melakukan seleksi populasi ternak yang didatangkan dari luar daerah atau dari pulau lain di tingkat lokal. Optimalisasi program di sub sektor peternakan melalui IB didukung oleh keberhasilan program Intan Sejati (diresmikan Gubernur Jawa Timur pada penghujung tahun 2003) dengan target peningkatan jumlah akseptor IB hingga mencapai satu juta akseptor sapi potong dan 195.000 akseptor sapi perah.

Pencapaian jumlah populasi sapi potong pada tahun 2008 adalah 2,8 juta ekor dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 3,38 juta ekor hingga target program sejuta ekor sapi dapat tercapai pada tahun 2014. Dalam kegiatan Intan Sejati, pelaksanaan program utamanya dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu regulasi, fasilitas serta akselerasi. Keterkaitan antara program Intan Sejati dengan PSDS adalah dalam hal optimalisasi pencapaian akseptor dan kelahiran. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan, program Intan Sejati juga banyak mewarnai beberapa konsep yang berkaitan dengan kegiatan yang dicanangkan dalam pencapaian program PSDS.

Secara teknis, mekanisme pengadaan dan pendistribusian straw untuk seluruh wilayah di Jawa Timur diatur dengan sistem pengendalian usaha melalui koperasi dan BBIB Singosari maupun BIB Lembang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi melalui koperasi untuk menyediakan N2 cair untuk penyimpanan straw dan dikirimkan ke SPIB yang ada di masing-masing kabupaten dengan frekuensi dua kali seminggu.

Dukungan terhadap pengembangan pembibitan sapi potong yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur diperoleh dari usaha perbibitan rakyat melalui VBC, serta ditunjang oleh BBIB Singosari. Berdasarkan SK Mentan Nomor 681/Kpts/OT.140/11/2004, terdapat sebelas tugas pokok dan fungsi BBIB, diantaranya: penyusunan program kegiatan, produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan; pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen unggul ternak; pelaksanaan pengembangan teknik dan metode inseminasi buatan; pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi dan pemantauan mutu semen unggul ternak serta pengembangan inseminasi buatan; pelaksanaan pemasaran dan distribusi semen unggul ternak serta beberapa tupoksi BBIB lainnya.

Peran serta Dinas Peternakan Kabupaten Malang dalam mendukung kegiatan BBIB Singosari, misalnya, sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Provinsi sejak tahun 2003, yaitu turut serta melaksanakan program Intan Sejati yang kemudian menjadi program Sapi Berlian. Beberapa kegiatan yang dilakukan di tingkat Dinas Peternakan Kabupaten Malang untuk mendorong pemenuhan bibit ternak sapi potong dilakukan melalui: penyelenggaraan pelatihan bagi inseminator non PNS, pengadaan bibit berupa semen beku (straw) dari KPRI Rukun Warga Disnak dan KPRI Sejahtera Jaya, pertemuan inseminator setiap bulan serta pengadaan sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan IB sasaran dan target yang dilakukan oleh para petugas inseminator di lapangan adalah semua peternak sapi potong dengan sistem pembiayaan yang dilakukan dengan swadaya murni. Biaya jasa IB untuk suntikan pertama sebesar Rp

50.000, sedangkan yang kedua dikenakan biaya sebesar Rp 30.000. Rata-rata pelaksanaan IB dilakukan 1,5 kali dosis suntikan pada seekor sapi. Biaya jasa IB yang dibayarkan oleh para peternak hingga ternak sapi positif mengalami kebuntingan dan untuk pemenuhan kebutuhan serum untuk IB di tingkat peternak diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Malang. Tingkat keberhasilan atau kebuntingan melalui teknik IB, sebesar 70 persen, tergantung pada kesiapan petugas dalam menindaklanjuti laporan dari peternak saat sapi peliharaannya mengalami birahi.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Sulawesi Selatan menangani pembibitan ternak dan meningkatkan produksi semen beku yang dihasilkan oleh Balai Inseminasi Buatan Daerah (Makassar) sebagai unit pelayanan Inseminasi Buatan (berlokasi di Fuca dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Maros). Upaya optimalisasi peran dan fungsi dua UPTD tersebut juga ditunjang dengan keberadaan UPTD Pengujian Produk-Produk Hasil Peternakan dan Hewan serta UPTD Diagnosis Kesehatan Hewan. Semua kegiatan UPTD ini berada dibawah koordinasi Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan UPTD Pembibitan Ternak serta UPTD IB mempunyai peran yang cukup penting dalam pelaksanaan Program Pencapaian Peternakan Provinsi dan Daerah 2014, melalui Program Satu Juta Ekor Ternak Sapi melalui Gerakan Optimalisasi Sejuta Sapi (GOSS).

Tujuh kegiatan andalan GOSS meliputi: (1) optimalisasi kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan perkawinan alam terhadap induk sapi yang sudah ada selama ini; (2) penambahan induk dan pejantan unggul; (3) pengendalian pemotongan terhadap sapi betina yang masih produktif; (4) operasi pengamanan lalu lintas ternak sapi ke luar wilayah Sulawesi Selatan; (5) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan; (6) pengendalian penyakit ternak; dan (7) investasi dan permodalan. Menurut penelitian Paly (2010) umumnya para pemangku kepentingan program GOSS tidak setuju dengan kegiatan pengendalian pemotongan sapi betina dan pengamanan lalu lintas ternak ke luar wilayah Sulawesi Selatan.

Sejauh ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Sulawesi

Selatan dengan program IB. Program ini secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tanpa pungutan biaya, termasuk untuk para petugas maupun bahan dan alat yang dipergunakan. Hal ini dilakukan pada permulaan program untuk memuluskan program IB Mandiri. Upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan mendatangkan ternak betina dari sentra produksi ternak nasional, pengadaan pejantan kemudian mempertahankan ternak-ternak betina produktif untuk tetap dipelihara serta melakukan seleksi terhadap ternak-ternak yang akan dijual. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa populasi ternak telah mencapai 700 ribu ekor. Diharapkan pada tahun 2013-2014 jumlah ternak bisa mencapai 1 juta ekor sebagai target yang sudah dicanangkan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah keterbatasan jumlah inseminator dibandingkan dengan cakupan wilayah peternakan yang ada, ketersediaan semen beku berdasarkan jumlah permintaan peserta IB (akseptor) yang dapat dipenuhi oleh UPTD melalui BIBD Fuca Makassar, maupun yang dilakukan melalui pemesanan dari BBIB Singosari serta BIB Lembang selama ini. Adanya sistem penganggaran melalui APBN untuk dana pelatihan peternak bagi 100-200 orang per tahun juga masih menjadi agenda penyelesaian pemerintah daerah selain ketersediaan bahan pengawet N2 (nitrogen) cair yang hanya dikeluarkan oleh PT Samator sebagai agen tunggal pemasok bahan kimia tersebut, mengingat hampir setiap saat mengalami peningkatan harga yang semakin mahal.

Terkait dengan keberadaan UPTD Pembibitan Ternak, BIBD Fuca Makassar, UPTD Pengujian Produk Hasil Peternakan dan Hewan dan UPTD Diagnostis Keswan relatif belum optimal menjalankan fungsi teknis maupun sosial yang harus dilakukannya. Beberapa hal yang dikemukakan oleh pengelola UPTD tersebut sangat terkait dengan fasilitas (sarana-prasarana) dan sumberdaya manusia, serta sumberdaya ternak sebagai penghasil semen beku sehingga pemenuhan kebutuhan semen beku 70 persen masih tergantung ke BIB Lembang dan BBIB Singosari. Disisi lain keterbatasan SDM dan fasilitas masih terkait dengan kebijakan struktur organisasi serta penganggaran peme-

rintah daerah provinsi untuk mengoptimalkan peran UPTD tersebut. Dimana pada awal-awal produksi semen beku dihadapkan pada terjadinya straw yang pecah serta banyak keluhan dari para peternak karena dari straw yang dihasilkan BIBD pertumbuhan ternak yang dilakukan IB dari straw Makassar relatif lambat dibandingkan dari hasil IB yang mempergunakan straw dari Lembang maupun Singosari.

Menurut BB Veteriner Maros terdapat *virus brucellosis* yang merupakan kuman menular di bagian sel dalam. Penyebaran virus ini mengakibatkan penyakit keguguran pada masa kebuntingan. Virus ini sulit di deteksi karena secara fisik ternak sapi kelihatan sehat dan gemuk. Penyebaran virus ini biasanya melalui interaksi makanan atau dengan kawin alami, kemudian menyebar menjadi penyakit menular hingga dapat menjangkiti manusia. Endemi virus menular ini terjadi sejak tahun 1984-2004 hingga sekarang masih dalam pengawasan, terutama yang masih berjangkit di Maluku dan Maluku Utara khususnya di Pulau Buru dan sekitarnya dimana dari populasi 30.000 ekor ternak sapi *eks drop master*, 35 persen diantaranya telah terjangkit penyakit ini dan menyebabkan penyakit gangguan reproduksi (Sayaka *et al.*, 2009).

Upaya pencegahan sudah sejak lama dilakukan melalui eradikasi serta pemberian vaksin oleh BB Veteriner Maros, sebagai lembaga yang berkompeten dengan kesehatan hewan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Jumlah biaya yang digunakan dalam menangani penyakit reproduksi tersebut selama tiga tahun mencapai Rp 3 milyar sekaligus merupakan biaya yang cukup tinggi. Hasil penelitian lebih lanjut, keberadaan jenis *virus Brucellosis* juga telah ditemukan di Barru, Maros dan Polmas (Sulawesi Selatan), Sulawesi Tengah serta Kendari (Sulawesi Tenggara).

Dikhawatirkan dengan adanya perdagangan ternak sapi antar daerah (kabupaten) di Sulawesi Selatan maupun penjualan antar pulau dimana intensitas kegiatan penjualan cukup tinggi maka penyebaran virus tersebut bisa secara langsung maupun tidak menyebar ke daerah-daerah dimana ternak sapi diperjualbelikan, mengingat tanda-tanda yang diperlihatkan akibat serangan virus ini tidak terlihat secara fisik karena kondisi fisik sapi

tetap sehat. Hasil penelitian BB Veteriner Maros ini pernah diinformasikan kepada dinas instansi terkait, namun terkendala dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, sehingga respon yang diharapkan sangat tergantung kepada kebijakan mitra kerjasama dalam hal ini Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dalam pendanaan yang terkait dengan mobilitas penjualan ternak antar daerah. Hal ini disebabkan di beberapa daerah tidak mempunyai konsep yang jelas tentang penanganan kasus ini.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencanangkan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) sebagai *icon* pengembangan usaha peternakan sapi potong. Program BSS secara resmi diluncurkan oleh Gubernur NTB dengan persiapan dan fasilitasi yang cukup untuk mendukung program ini. Dinas Peternakan Provinsi NTB bertindak sebagai *vocal point* kegiatan BSS.

Program BSS juga sejalan dengan program percepatan penyediaan daging sapi nasional. Dengan semboyan "Provinsi Nusa Tenggara Barat Bumi Sejuta Sapi" atau dikenal dengan sebutan NTB BSS, maka upaya percepatan pengembangan populasi melalui inovasi manajemen dan teknologi, kelembagaan dan pembiayaan untuk meningkatkan nilai tambah dilaksanakan sejak dicanangkan oleh Gubernur NTB pada tanggal 17 Desember 2008 di Mataram. Program NTB BSS adalah program percepatan pengembangan peternakan sapi menuju populasi satu juta ekor dalam waktu lima tahun (2009-2013). Pada masa mendatanag NTB diharapkan menjadi provinsi surplus sapi yang dikembangkan terintegrasi dengan sektor lainnya guna mendukung ketahanan pangan berupa protein hewani (Wahyudi, 2009).

Program NTB-BSS sangat terkait dengan wilayah pengembangan ternak berbasis budidaya. Sejuta Sapi adalah menyangkut populasi sapi yang besar dari berbagai jenis, baik sapi Bali, Hissar, Simmental, Limousin, Brangus, Sapi FH, Brahman Herford, dan sapi-sapi hasil silangan lainnya. Dengan demikian maka Bumi Sejuta Sapi yang dimaksud adalah wilayah pengembangan peternakan "sapi" untuk meningkatkan ekonomi, daya beli, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Misi NTB BSS itu sendiri adalah:

(a) menjadikan NTB sebagai provinsi surplus sapi, (b) mengembangkan peternakan sapi terintegrasi dengan sektor lain, (c) mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan protein hewani, (d) mengendalikan penyakit hewan menular pada hewan maupun dari hewan ke manusia, (f) meningkatkan sarana prasarana, SDM dan kelembagaan peternakan, (g) pelestarian lingkungan melalui penyediaan pupuk organik dan energi alternatif, (h) penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha masyarakat, serta (i) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan, strategi dan sasaran yang ingin dicapai NTB BSS adalah: (a) peningkatan populasi dan produktivitas sapi melalui langkah 3 S, artinya satu induk, satu anak, satu tahun; kemudian pengendalian pengeluaran sapi bibit betina, pengendalian pemotongan betina produktif dan pengendalian penyakit pedet; (b) pengaturan tata ruang padang penggembalaan ternak, (c) pemanfaatan teknologi pakan dan limbah pertanian/industri, (d) penyediaan daging ASUH, (e) pengembangan SDM dan kelembagaan, melalui revitalisasi penyuluhan peternakan, pengembangan kelompok tani ternak/kandang kolektif dan pengembangan institusi pendukung NTB BSS, (f) pengembangan sarana dan prasarana peternakan sapi serta (g) peningkatan investasi bidang peternakan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2009).

Program aksi juga sudah dirancang dalam kaitan dengan sasaran strategis tahun 2013 meliputi populasi sapi lebih dari sejuta ekor, tercapainya grade sapi A dan B, terbangunnya pabrik pakan, berkembangnya industri hilir peternakan, pengembangan pariwisata dan peningkatan swasembada serta dapat menyerap tenaga kerja sekitar 344.000 orang. Berdasarkan nilai strategis dari program aksi yang dicanangkan, maka dengan target pencapaian populasi diatas akan menghasilkan nilai finansial sebesar Rp 5,5 triliun. Kontribusi swasembada daging nasional 16.400 ton, disamping kontribusi potensi pupuk 5,02 juta ton, produksi kulit 60.250 lembar, bahkan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan peternak hingga mencapai Rp 1,1 triliun. Untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah NTB telah melakukan

upaya melalui 3 pendekatan. Tiga langkah intervensi strategis percepatan yang meliputi: (a) intervensi teknologi dan manajemen; (b) intervensi kelembagaan, dan (c) intervensi anggaran.

Program NTB BSS juga meningkatkan peran lembaga Pembibitan Ternak Sapi Daerah, seperti BLPKH Banyuwilek sebagai penghasil semen beku sapi jenis impor, sapi Bali, dan hasil persilangannya. Produksi semen beku yang dihasilkan oleh BLPKH Banyuwilek relatif masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan semen beku di wilayah Provinsi NTB. Keterbatasan produksi straw yang dihasilkan oleh BLPKH Banyuwilek pada dasarnya sangat berkaitan dengan keterbatasan dan kondisi sapi pejantan baik dalam jumlah maupun usianya. Selain keterbatasan sumber benih sapi impor, terbatasnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemeliharaan, termasuk alat dan bahan, juga menjadi kendala yang perlu segera mendapat perhatian.

Peran kelembagaan keuangan dalam kaitan dengan program percepatan populasi sapi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaraan pola kemitraan dengan memanfaatkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pola ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan jumlah dana yang tersedia sebesar Rp 20,4 milyar. Program pendukung lainnya, seperti Program Sarjana Membangun Desa (SMD) yang pada tahun 2009 di NTB ditempatkan sebanyak 50 orang, mempunyai tugas untuk melakukan pengawalan usaha peternakan yang dikelola secara individu ataupun kelompok, serta usaha dalam lingkungan VBC. Hingga saat ini di Provinsi NTB tersebar 57 unit kelompok VBC.

PROSPEK PERBENIHAN SAPI POTONG

Perbenihan sapi potong memegang peran yang sangat penting dalam mendukung PSDS 2014. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan mutu dan penyediaan bibit ternak. Untuk tujuan tersebut perlu diperhatikan optimalisasi akseptor dan inseminasi buatan, termasuk penanganan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan, pengembangan pakan, dan infrastruktur rumah

potong hewan. Kementerian Pertanian bersama perbankan juga menyediakan *skim* kredit untuk mendorong swasta dan masyarakat mengembangkan pembibitan sapi potong melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Sebagai kredit program pemerintah, KUPS diharapkan dapat membantu pengembangan usaha pembibitan sapi. Walaupun demikian penyerapan kredit ini relatif rendah. Sampai bulan Agustus 2011 hanya 79 debitur yang menerima KUPS yang nilai totalnya sebesar Rp 291,44 milyar atau 7,5 persen dari nilai plafon kredit (Rp 3,88 triliun) yang disalurkan oleh BRI, BNI, Mandiri, Bank Sumatera Utara, Bank Sumatera Barat, Bank DIY, Bank Jatim, dan Bank Bali (Sayaka *et al.*, 2009). Sampai bulan Oktober 2011 penyerapan KUPS baru mencapai 10 persen dari plafon (Chevni, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa perbenihan sapi potong walaupun memegang peranan penting dalam peningkatan populasi sapi tetapi bukan merupakan bisnis yang banyak diminati masyarakat. Bunga KUPS relatif rendah, yaitu hanya 5 persen per tahun, tetapi risiko bisnis perbenihan sapi potong relatif besar dan tidak menguntungkan jika dilakukan dalam skala kecil. Disamping itu peternak biasanya membeli sapi bakalan ke pasar terdekat jika mempunyai uang yang cukup, bukan membeli ke pusat pembibitan sapi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2008) untuk peternakan intensif dan berskala besar di PT Lembu Jantan Perkasa di Serang, Provinsi Banten, menunjukkan bahwa pembibitan secara intensif minimal memerlukan jumlah sapi sekitar 3.500 ekor untuk satu perusahaan. Besarnya biaya investasi sekitar Rp 1,6 milyar dan biaya operasional pada awal tahun sebanyak Rp 11,8 milyar yang sebagian besar (Rp 6,8 milyar) adalah biaya pembelian sapi bakalan. Biaya investasi akan kembali setelah sekitar 3,5 tahun. Anak sapi yang dijual dikelompokkan menjadi dua, yaitu berbobot 40 -175 kg dan 175-250 kg per ekor. Disamping itu juga dilakukan penjualan sapi bunting muda dan sapi bunting tua. Penjualan sapi berbobot diatas 250 kg tidak lagi optimal, apalagi hingga bobotnya mencapai 390 kg.

Selain usaha pembibitan, berbagai pemikiran diusulkan dalam upaya peningkatan produksi daging sapi dalam negeri apalagi

setelah insiden penundaan atau embargo ekspor sapi Australia ke Indonesia pada bulan Mei 2011. Embargo ini bisa merupakan kesempatan (*blessing in disguise*) untuk meningkatkan produksi sapi dalam negeri. Impor daging sapi dan sapi bakalan secara besar-besaran telah menyebabkan harga sapi lokal turun drastis. Embargo ini bisa disikapi dengan berbagai langkah nyata, yaitu: (i) melakukan tunda potong, (ii) meningkatkan produksi daging unggas, kambing/domba, babi, dan aneka ternak untuk substitusi daging sapi, (iii) mengimpor karkas dari negara selain Australia. Jika embargo sudah dihentikan maka perlu memperhatikan: (i) meminimalkan pelabuhan impor sapi dan menghilangkan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS), (iii) ternak yang diimpor harus berbobot lebih dari 350 kg, jantan maupun betina, dan tidak disuntik hormon, (iv) impor hanya boleh dilakukan pengusaha penggemukan sapi dan menjual ke rumah potong hewan (RPH) resmi, dan (v) importir sapi harus bersedia membeli sapi lokal (Diwyanto, 2011b).

Dalam jangka pendek produksi daging sapi dalam negeri bisa ditingkatkan jika sapi yang dipelihara peternak ditunda pemotongannya atau tidak dipotong ketika umur sapi masih relatif muda atau bobotnya masih bisa ditingkatkan. Diwyanto (2011c) menyarankan tunda potong sapi dari rata-rata bobot 300 kg menjadi 390 kg atau naik sekitar 30 persen dapat menekan (*gap*) kekurangan pasokan daging sapi domestik dari 148 ribu ton/tahun menjadi 70 ribu ton/tahun dengan asumsi populasi sapi sebanyak 13 juta ekor. Jika asumsi populasi sapi adalah 14 juta ekor maka tunda potong bisa menekan kekurangan suplai daging sapi dalam negeri dari 128 ribu ton menjadi hanya 44 ribu ton. Jika asumsi populasi sapi adalah 15 juta ekor maka kekurangan produksi daging sapi melalui tunda potong hanya 18 ribu ton per tahun. Hal ini bisa mempercepat swasembada daging sapi jika semua ternak sapi potong yang ada ditunda pemotongannya. Walaupun demikian perlu dicari alternatif seandainya tunda potong dilaksanakan maka pada saat yang bersamaan akan terjadi kekurangan pasokan sapi lokal untuk dipotong.

Hasil penelitian Sariubang dan Tambing (2000) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa sapi Bali yang

dipelihara secara ekstensif maupun semi intensif hanya mengalami penambahan bobot rata-rata kurang dari 30 persen selama setahun. Sapi yang dipelihara ekstensif, yaitu tidak dikandangkan dan diberi makan rumput di lapangan, mengalami penambahan bobot 29 persen selama setahun. Sedangkan pemeliharaan sapi secara semi intensif, yaitu dengan pemberian makan rumput lapangan ditambah konsentrat, dedak maupun daun gamal hanya menambah bobot antara 18 hingga 23 persen per tahun. Dengan demikian sulit bagi sebagian besar peternak sapi yang cara pemeliharaannya ekstensif maupun semi intensif untuk menunda penjualan sapi. Penundaan pemotongan sapi supaya bobotnya naik 30 persen memerlukan waktu sekitar satu tahun. Hal ini sulit dilaksanakan oleh peternak terutama karena desakan kebutuhan uang tunai.

Pencegahan pemotongan sapi betina produktif (SBP) bisa diterapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU No. 6/1967 dan UU 18/2009. Di Nusa Tenggara Timur, Misalnya, larangan ini membuat harga sapi betina lebih rendah Rp 0,5 – 1 juta per ekor dibanding harga sapi jantan. Dalam kondisi apapun peternak akan menjual SBP jika memerlukan uang tunai (Diwyanto, 2011a). Jika Pemerintah atau Pemerintah Daerah menerapkan larangan pemotongan SBP juga harus menyediakan dana dalam jumlah sangat besar untuk pembelian dan pemeliharaan hingga SBP tersebut tidak produktif lagi dan baru bisa dijual.

PENUTUP

Perbenihan sapi potong sangat diperlukan dalam mendukung PSDS 2014. Pemerintah Provinsi juga mendukung swasembada daging sapi dengan berbagai program sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Ada peluang bahwa daerah-daerah tersebut bisa mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran jumlah populasi sesuai program di tiap daerah perlu dukungan pemerintah pusat terutama pengadaan semen beku untuk IB.

Berbagai peraturan telah ditetapkan terkait produksi sapi. Umumnya peraturan

tersebut cukup ideal jika bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian jumlah dan mutu semen beku yang akan digunakan untuk IB sangat menentukan pertumbuhan populasi di daerah. Secara umum permintaan IB dari peternak sapi cukup tinggi tetapi hambatan yang utama adalah produksi semen beku belum mencukupi karena jumlah pejantan unggul di BPTU terbatas. Disamping itu juga ada keterbatasan jumlah petugas IB serta biaya IB yang dianggap peternak relatif mahal.

Usaha pembibitan sapi bisa dilaksanakan dalam skala besar tetapi kurang menjanjikan serta risiko yang relatif besar. Penundaan pemotongan sapi dan pelarangan pemotongan SBP merupakan upaya lain dalam peningkatan produksi daging sapi tetapi secara praktis sulit dilaksanakan. Peningkatan jumlah inseminator, penambahan sapi pejantan unggul, perbaikan fasilitas Balai Inseminasi Buatan, kecukupan pakan, dan intensifikasi lahan penggembalaan merupakan upaya yang perlu segera mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional, 2005. Standar Nasional Indonesia SNI 01-4869.1-2005 untuk Semen Beku Sapi. Jakarta.
- Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. 2009. Kinerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Malang.
- Chevni, A.A. 2011. Kredit Pembibitan Sapi Baru Terserap 10%. Bisnis Indonesia 21 November 2011. bisnis.com. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2006. Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, Direktur Jenderal Peternakan. Direktorat Pembibitan. Jakarta
- Departemen Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 59/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS). Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS), Direktur Jenderal Peternakan. Jakarta.

- Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Teknis Program Percepatan Swasembada Daging Sapi. Jakarta.
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. 2009. Target 1 Juta Sapi Potong pada 2014 Sulit Dicapai Sabtu, 21 Nopember 2009. <http://www.disnak.jabarprov.go.id/index.php?mod=detilBerita&idMenuKiri=&idBerita=383>
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 2009. Sasaran, Realisasi dan Persentase Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran Pedet Hasil Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi Potong di Provinsi Jawa Timur, Januari - Juni 2009. Surabaya.
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. 2011. Program Intan Satu Saka, 155 Smart atau 158 Excelent di Pamekasan. <http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php/Riset-dan-Teknologi>. Tanggal 19 Mei 2011.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012. Unit Pelaksana Teknis: Balai Inseminasi Buatan Lembang Bandung. <http://ditjennak.deptan.go.id/index.php?page=upt&action=infoupt&idcat=189>
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 122/Kpts/Ot.210/F/11.06 tentang Petunjuk Teknis Produksi dan Distribusi Bibit Ternak pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggul. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 121/Kpts/Ot.210/F/11.06 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Semen Beku Sapi dan Kerbau. Jakarta.
- Diwyanto, K. dan Herliantien. 2006. Aplikasi Teknologi Inovatif Sexing Dalam Program Inseminasi Buatan dan Usaha Cow-Calf Operation. *Wartazoa* Vol. 16 No. 4:171-180.
- Diwyanto, K. dan R.A. Saptati. 2010. Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Ternak: Susu dan Daging Sapi. *dalam* Nizam, M. Munir, dan A.M. Fauzi (Penyunting). Menuju Kedaulatan Bangsa. Klaster Ketahanan Pangan, hal 83-98. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Diwyanto, K. 2011a. Mencegah Pematangan Sapi Betina Produktif dan Meningkatkan Populasi Sapi Menuju Swasembada Daging. Policy Paper 5. Forum Komunikasi Profesor Riset Badan Litnag Pertanian. Mareta 2011. Jakarta. 8 hal.
- Diwyanto, K. 2011b. Mengurangi Ketergantungan Pasokan Daging dan Sapi Bakalan dari Australia. Policy Paper. Forum Komunikasi Profesor Riset Badan Litnag Pertanian. Mareta 2011. Jakarta. 7 hal.
- Diwyanto, K. 2011c. Tunda Potong Sebagai Strategi Jangka Pendek untuk Mendukung Program Swasembada Daging Sapi. *dalam* Sumarno, T.D. Sudjana, I. Las, B. Prastowo, dan Hermanto, hal 55-62. Forum Komunikasi Profesor Riset. Policy Brief: Inovasi Teknologi dan Kelembagaan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. 151 hal.
- Hadi, P.U., dan N. Ilham. 2002. Problem dan Prospek Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong di Indonesia. *Jurnal Badan Litbang Pertanian* 21(4): 148-157.
- Ilham, N., E. Basuno, W.K. Sejati, S. Nuryanti, Ashari, F.B.M. Dabukke, dan R. Elizabeth. 2011. Keragaan, Permasalahan dan Upaya Mendukung Akselerasi Program Swasembada Daging Sapi. *Makalah Seminar Hasil Penelitian TA 2011*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. 36 hal.
- Kementerian Pertanian. 2009. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta. 184 hal.
- Kementerian Pertanian. 2010. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/2010 tentang Pedoman Umum. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Ot.140/11/2004. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan.
- Kompas. 2008. Indonesia Kekurangan Benih Sapi. www.kompas.com. Monday 14 Juli 2008.
- Pemkab Enrekang. 2008. Enrekang Siap Jadi Pemasok Bibit Kentang. www.enrekangkab.go.id/index.php?option=com
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2003. Keputusan Gubernur Jawa Timur No 64/2003 tentang Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Sejuta Akseptor Sapi (INTAN SEJATI) di Jawa Timur. Surabaya
- Pemprov Jatim. 2009. Kentang Pasuruan Persilangan Lokal, Jerman dan Belanda. www.d-infokom-jatim.go.id/news_pot.php?id=7&t=316 6 Januari 2009.
- Putria, R. 2008. Analisis Kelayakan Usaha Pengembangan Pembibitan (*Breeding*) Sapi Potong pada PT Lembu Jantan Perkasa (LJP), Serang, Propinsi Banten. Program Sarjana Ekstensi Manajemen

- Agribisnis Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Bogor. 130 hal.
- Sariubang, M. dan S.T. Tambing. 2000. Analisis Pola Usaha Pembibitan Sapi Bali yang Dipelihara Secara Ekstensif dan Semi Intensif, hal. 408-412 *dalam* Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor. 601 hal.
- Wahyudi, S. 2009. NTB Menuju Bumi Sejuta Sapi. 15 Mei 200. <http://www.vet-indo.com/Artikel-Member/NTB-Menuju-Bumi-Sejuta-Sapi.html>
- Wahyuni, N.D. 2009. RI Baru Swasembada Daging 2014. Rabu, 11/03/2009 20:31 WIB. www.detikFinance.com
- Zairin, M., Mashur, Sudarto, Prisdininggo dan N. Inggah. 2004. Pengkajian Adaptasi Teknologi Pembibitan Kentang pada Dataran Tinggi Sembalun di Lombok Timur NTB. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB. Mataram.